



## ***A Path to Job-Ready Graduates: The Urgency of Curriculum Regulation to Overcome the Competency Gap at State Islamic University (UIN) Jurai Siwo Lampung***

### **Jalan Menuju Lulusan Siap Kerja: Urgensi Regulasi Kurikulum untuk Mengatasi Kesenjangan Kompetensi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung**

Author's Name\* : Supendi  
 Institution/University : State Islamic University of Jurai Siwo Lampung  
 Correspondence Author's E-mail : [supendi@metrouniv.ac.id](mailto:supendi@metrouniv.ac.id)

<b>Article History</b>	Received (September 19 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (October 27 <sup>th</sup> , 2025)	Accepted (December 11 <sup>th</sup> , 2025)
------------------------	---	--	--

#### **News Article**

<b>Keyword:</b>	<b>Abstract</b>
Competency; Gap; Curriculum; Strategic; Partnership.	<p><i>This policy paper addresses the urgent need for curriculum reform to bridge the competency gap among graduates of State Islamic University (UIN) Jurai Siwo Lampung. The core issue lies in the misalignment between graduate profiles and the demands of the modern job market, stemming from a lack of a data-driven evaluation mechanism, minimal collaboration with the private sector, and a slow bureaucratic process. This paper utilizes a qualitative methodology and a systemic approach, beginning with a causal analysis to map the root problems, followed by the formulation and analysis of five strategic policy alternatives. These alternatives are crafted as formal regulations, such as ministerial decrees and circulars, to ensure their binding and sustainable implementation. A comparative analysis utilizing a structured scoring method was then applied to identify the most effective policy alternative. The findings suggest that the optimal solution is a regulation mandating the implementation of an integrated data management system and the decentralization of curriculum change authority. The recommendations aim to provide practical guidance for policymakers at both the university level and the Directorate General of Islamic Education of the Ministry of Religious Affairs. It is anticipated that implementing this policy will transform UIN Jurai Siwo Lampung into an institution that is responsive to industry dynamics, thereby enhancing graduate employability in the job market and optimizing the contribution of Islamic higher education to national human capital development.</i></p>

<b>Kata Kunci:</b>	<b>Abstrak</b>
Kesenjangan; Kompetensi; Kurikulum; Kemitraan; Strategis.	<p>Artikel kebijakan ini membahas urgensi reformasi kurikulum untuk mengatasi kesenjangan kompetensi lulusan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah ketidaksesuaian antara profil lulusan dan kebutuhan pasar kerja modern, yang disebabkan oleh tidak adanya mekanisme evaluasi berbasis data, minimnya kolaborasi dengan industri, serta proses birokrasi yang lambat. Tulisan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan sistemik yang dimulai dengan pemetaan akar masalah menggunakan kerangka analitis sebab-akibat, dilanjutkan</p>

dengan perumusan dan analisis lima alternatif kebijakan strategis. Alternatif kebijakan tersebut diformulasikan dalam bentuk regulasi formal seperti Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) untuk memastikan implementasinya bersifat mengikat dan berkelanjutan. Analisis komparatif menggunakan metode skoring terstruktur kemudian digunakan untuk mengidentifikasi alternatif kebijakan paling efektif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa solusi yang optimal adalah regulasi yang mewajibkan penerapan sistem manajemen data terintegrasi dan desentralisasi otoritas perubahan kurikulum. Rekomendasi yang disajikan bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan di level universitas dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan UIN Jurai Siwo Lampung sebagai institusi yang responsif terhadap dinamika industri, sekaligus meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja dan mengoptimalkan kontribusi lembaga pendidikan tinggi keagamaan pada pembangunan sumber daya manusia nasional.

---

**To cite this article:** Supendi. (2025). "A Path to Job-Ready Graduates: The Urgency of Curriculum Regulation to Overcome the Competency Gap at State Islamic University (UIN) Jurai Siwo Lampung". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume 1(2)*, Page: 365 - 388

---



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, kebutuhan pasar tenaga kerja mengalami pergeseran fundamental. Model ekonomi berbasis manufaktur dan komoditas kini beralih ke ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi, di mana keterampilan (skill) menjadi aset utama. Perubahan ini menuntut lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga produsen utama modal manusia yang adaptif dan relevan dengan dinamika global (OECD, 2019). Tanpa adaptasi yang cepat, akan terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan tuntutan pasar.

Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana bonus demografi menjadi peluang sekaligus tantangan besar. Dengan jumlah populasi usia produktif yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terdepan di dunia. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud jika angkatan kerja muda memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kegagalan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten akan mengubah bonus demografi menjadi bencana demografi, yang ditandai dengan tingginya angka pengangguran terdidik dan produktivitas yang rendah.

Saat ini, Indonesia menghadapi masalah serius dalam hal penyerapan tenaga kerja, khususnya lulusan perguruan tinggi. Data menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan (skills gap) yang signifikan, di mana banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, sementara pada saat yang sama, industri melaporkan kesulitan dalam merekrut talenta yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang dibutuhkan. Kesenjangan ini menciptakan inefisiensi di pasar tenaga kerja dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional (World Bank, 2018).

Perguruan tinggi, sebagai institusi yang bertanggung jawab langsung dalam mencetak lulusan, memegang peran sentral dalam mengatasi masalah ini. Menurut teori modal manusia (Becker, 1993), investasi dalam pendidikan tinggi seharusnya menghasilkan individu dengan produktivitas tinggi. Namun, ketika kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan industri, investasi tersebut menjadi tidak optimal dan tidak memberikan pengembalian yang maksimal, baik bagi individu maupun bagi ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu indikator utama dari masalah ini adalah kurikulum perguruan tinggi yang bersifat statis dan teoritis. Banyak program studi, meskipun kaya akan teori dan konsep akademis, gagal memasukkan elemen praktis dan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan. Lulusan mungkin memiliki pengetahuan yang luas, tetapi kurang memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam konteks profesional. Hal ini membuat mereka kurang siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja (Wahyudi & Susanto, 2020).

Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian kompetensi (mismatch) antara lulusan dan kebutuhan pasar. Ketidaksesuaian ini sering kali disebabkan oleh proses pembaruan kurikulum yang tidak responsif terhadap perubahan cepat di industri. Lembaga pendidikan cenderung mempertahankan metode dan materi ajar lama, sementara dunia kerja terus berkembang dengan adanya teknologi baru, model bisnis baru, dan permintaan keterampilan baru (McGrath & King, 2018). Berikut ini Adalah data program studi di UIN Juriai Siwo lengkap dengan Akreditasi Program studi Data akreditasi Program studi di IAIN Metro sebagaimana tergambar dalam tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Data Akreditasi Program studi

No	Jenjang	Program Studi	Status	Peringkat	Masa Berlaku	Ket.
1.	S1	Akuntansi Syari`ah	Aktif	Baik Sekali	7/28/2026	
2.	S1	Bahasa dan Sastra Arab	Aktif	Baik Sekali	9/17/2024	
3.	S1	Bimbingan Penyuluhan Islam	Aktif	Baik	7/29/2026	
4.	S1	Ekonomi Syariah	Aktif	Unggul	9/13/2026	
5.	S1	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Aktif	Baik Sekali	3/21/2022	
6.	S1	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Aktif	Baik	8/18/2026	
7.	S1	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)	Aktif	Baik Sekali	11/24/2025	
8.		Profesi Pendidikan Guru	Aktif	Baik		
9.	S1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Aktif	Baik sekali	12/31/2024	
10.	S1	Manajemen Haji dan Umroh	Aktif	Baik	3/21/2027	
11.	S1	Pendidikan Agama Islam	Aktif	Unggul	11/18/2025	
12.	S1	Pendidikan Bahasa Arab	Aktif	Baik Sekali	5/20/2021	
13.	S1	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Aktif	Unggul	1/26/2022	
14.	S1	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Aktif	Baik sekali	10/26/2027	

15.	S1	Perbankan Syariah	Aktif	Baik Sekali	12/29/2027	
16.	S1	Tadris Bahasa Inggris	Aktif	Baik Sekali	7/14/2021	
17.	S1	Tadris Biologi	Aktif	Baik Sekali	2/16/2026	
18.	S1	Tadris IPS	Aktif	Unggul	7/6/2026	
19.	S1	Tadris Matematika	Aktif	Unggul	1/5/2026	
20.	S2	Ekonomi Syariah	Aktif	Baik	8/31/2026	
21.	S2	Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)	Aktif	Baik	5/2/2022	
22.	S2	Pendidikan Agama Islam	Aktif	Baik	12/30/2025	
23.	S2	Pendidikan Bahasa Arab	Aktif	B	1/5/2026	
24.	S3	Pendidikan Agama Islam	Aktif	Baik	1/5/2027	
25.	S3	Ilmu Syariah	Aktif	Baik	1/5/2027	
26.	S1	Ilmu Alqur'an dan Tafsir	Aktif	Terakrediasi Sementara		
27.	S1	Ilmu Hadis	aktif	Terakrediasi Sementara		
28.	S1	Pengembangan Masyarakat Islam	aktif	Terakrediasi Sementara		

Sumber: Dokumen Lembaga Penjamin Mutu

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), seperti UIN Jurai Siwo Lampung yang memiliki banyak program studi keagamaan dan juga tantangan untuk meningkatkan status akreditasi, masalah ini memiliki kompleksitas tersendiri. Sebagai institusi yang memiliki mandat ganda, yaitu mencetak ilmuwan dan ulama, PTKI harus menyeimbangkan antara pendidikan keilmuan Islam dan pendidikan profesional. Keseimbangan ini sering kali sulit dicapai, dan fokus yang terlalu berat pada aspek keagamaan terkadang mengesampingkan pengembangan kompetensi profesional yang relevan dengan pasar. Berikut ini Adalah data Minat calon mahasiswa yang mendaftar di UIN Jurai Siwo Lampung sebagaimana data berikut.

**Tabel 2.** Data Minat Calon Mahasiswa Baru 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jalur SPAN-PTIKN	9.960	8.618	7.654	6.276	9.069
Jalur UM-PTIKN	3.088	2.732	1.955	1.822	3.008
Jalur Mandiri (MB)	1.288	768	960	723	1.080
Total	14.336	12.118	10.569	8.821	12.157

Sumo:ber: Sismik UIN Jurai Siwo Lampung

Studi kasus di UIN Jurai Siwo Lampung menunjukkan adanya tantangan spesifik yang berkaitan dengan orientasi keilmuan dan keterbatasan kolaborasi dengan sektor industri. Meskipun UIN Jurai Siwo Lampung telah menghasilkan banyak lulusan berkualitas, banyak dari mereka masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, khususnya di sektor-sektor non-tradisional. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kurikulum yang ada. Sebagai gambaran, berikut data hasil *tracer study* sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.** Data Hasil *Tracer study* di UIN Jurai Siwo Lampung

No	Jenis Profesi	2021	2022	2023	2024	Total
----	---------------	------	------	------	------	-------

1	Pendidikan ( Dosen-Guru)	125	185	380	540	1230
2	ASN-Non Pendidikan	25	15	20	54	114
3	Kyai/Ustazah/Pencerama/Dai	32	14	15	20	81
4	TNI- Polri	-	-	2	2	4
5	Wirausaha/ Pengusaha	-	-	-	-	-
6	Politisi/ Anggota Dewan	-	-	2	2	4
7	Wartawan/ Penyiar TV	-	-	2	2	4
8	Jurnalis/ Penulis	-	-	-	-	-
9	Perbankan	40	33	40	18	131
10	Hakim/Panitera	1		1	4	6
11	Lainnya	842	530	608	200	2180
	Jumlah	1065	777	1070	842	3754

Sumber: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id)

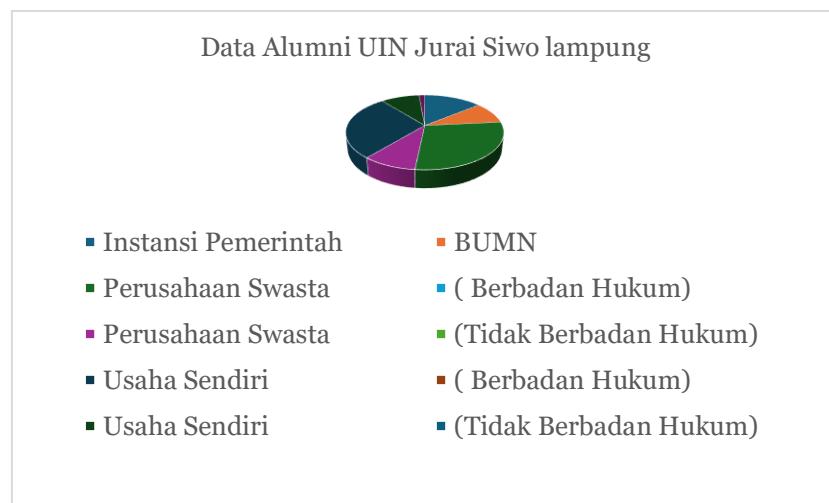
Dari data *tracer study* di atas dapat di jelaskan bahwa fenomena ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar di UIN Jurai Siwo Lampung. Kesenjangan ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah institusional yang memerlukan intervensi kebijakan yang terstruktur. Tanpa intervensi, reputasi universitas, daya saing lulusan, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal akan terus terhambat. Berikut Adalah table persentase Lulusan yang bekerja di dunia industry:

**Tabel 4.** Persentase yang Bekerja Sesuai Kompetensi

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Jalur SPAN-PTIKN	9.960	8.618	7.654	6.276	9.069
Jalur UM-PTIKN	3.088	2.732	1.955	1.822	3.008
Jalur Mandiri (MB)	1.288	768	960	723	1.080
Total	14.336	12.118	10.569	8.821	12.157

Sumber: Panitia Penerimaan Mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung

Untuk menggambarkan sebaran alumni dapat juga di lihat dari grafik berikut:



**Grafik 1.** Sebaran Alumni Berdasarkan *Tracer study*

Akar masalah dari fenomena ini adalah tidak adanya mekanisme evaluasi kurikulum yang berbasis data. Tanpa adanya *tracer study* yang sistematis dan berkelanjutan, serta tanpa survei reguler terhadap kebutuhan pasar, UIN Jurai Siwo Lampung tidak memiliki data yang akurat untuk dijadikan dasar dalam merumuskan dan memperbarui kurikulum. Keputusan kurikulum sering kali didasarkan pada asumsi, bukan pada bukti (Purnomo & Santoso, 2021).

Selain itu, kurangnya keterlibatan aktif pihak industri dalam proses perancangan kurikulum menjadi penyebab utama lainnya. Kurikulum sering kali dirumuskan secara internal oleh para akademisi tanpa masukan yang memadai dari praktisi di lapangan. Keterbatasan komunikasi dan kolaborasi ini menghasilkan kurikulum yang teoretis dan terlepas dari realitas dunia kerja (Mulyono & Handayani, 2021).

Penyebab ketiga yang memperparah masalah ini adalah proses birokrasi dan administrasi yang lambat dalam menyetujui perubahan kurikulum. Perubahan yang seharusnya cepat tanggap terhadap dinamika pasar, seringkali terhambat oleh prosedur yang berbelit dan hierarki pengambilan keputusan yang panjang. Inersia institusional ini membuat universitas sulit beradaptasi (Wahyudi & Susanto, 2020).

Kombinasi dari tiga penyebab ini—kurangnya data, minimnya kolaborasi, dan kelambatan birokrasi—menciptakan siklus kesenjangan yang sulit dipecahkan. Kurikulum yang tidak relevan menghasilkan lulusan yang tidak kompeten, yang kemudian membuat industri enggan berkolaborasi. Ketiadaan kolaborasi ini kemudian mencegah universitas mendapatkan data yang diperlukan untuk memperbaiki kurikulum, dan seterusnya.

Mengingat cepatnya perubahan di dunia kerja, masalah ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera diatasi. Jika tidak, UIN Jurai Siwo Lampung berisiko kehilangan relevansinya sebagai institusi pendidikan tinggi. Potensi lulusan yang tidak terserap di pasar kerja akan terus meningkat, menciptakan beban sosial dan ekonomi yang besar bagi Lampung dan Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang strategis dan berfokus pada regulasi berbasis data sebagai langkah fundamental untuk memutus siklus ini. Makalah kebijakan ini akan menganalisis secara mendalam urgensi penerapan kebijakan tersebut, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa setiap lulusan UIN Jurai Siwo Lampung memiliki kompetensi yang relevan dan siap untuk bersaing di pasar kerja.

Kesenjangan kompetensi ini tidak hanya merugikan institusi pendidikan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius bagi para lulusan. Mereka yang tidak memiliki keterampilan yang relevan seringkali menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menembus pasar kerja, yang berujung pada pengangguran atau, yang lebih umum, pengangguran terselubung (underemployment). Mereka terpaksa menerima pekerjaan di luar bidang studi mereka, yang tidak hanya menyia-nyiakan investasi pendidikan, tetapi juga mengurangi kontribusi potensial mereka terhadap perekonomian (Santoso & Purnomo, 2020).

Dari sudut pandang institusional, kegagalan dalam menghasilkan lulusan yang relevan akan berdampak pada reputasi dan akuntabilitas universitas. Di era digital, informasi tentang tingkat serapan lulusan dan relevansi kurikulum mudah diakses oleh calon mahasiswa dan orang tua. Jika universitas tidak mampu membuktikan bahwa lulusannya memiliki prospek kerja yang baik, minat pendaftar akan menurun, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan dan relevansi institusi itu sendiri di mata publik (DiMaggio & Powell, 1983).

Lebih jauh lagi, masalah ini memiliki implikasi makroekonomi yang besar. Ketika industri lokal tidak dapat menemukan talenta yang sesuai, mereka terpaksa merekrut dari luar negeri atau menurunkan standar produktivitas. Hal ini akan menghambat inovasi dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat menyebabkan ketergantungan pada tenaga kerja asing dan melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global (World Bank, 2018).

Melihat kompleksitas dan dampak masalah ini, peran pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI, menjadi sangat krusial. Sebagai otoritas yang menaungi seluruh PTKI, Dirjen Pendis memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan sistemik. Tanpa intervensi dari tingkat kebijakan tertinggi, upaya reformasi yang dilakukan oleh masing-masing institusi akan berjalan sporadis dan tidak efektif (Kemendikbudristek, 2020).

Di sisi lain, dosen sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum juga menghadapi tantangan besar. Meskipun memiliki keinginan untuk berinovasi, banyak dari mereka terjebak dalam budaya akademis yang lebih mengutamakan publikasi teoretis daripada keterlibatan praktis dengan industri. Sistem insentif dan jenjang karier yang ada seringkali tidak mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, sehingga membatasi pemahaman mereka tentang kebutuhan pasar yang terus berubah (Wahyudi & Susanto, 2022).

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya bergantung pada inisiatif dari bawah atau upaya parsial. Diperlukan sebuah pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak, dari pembuat kebijakan di tingkat nasional hingga pelaksana di tingkat fakultas dan program studi. Pendekatan ini harus berfokus pada pembangunan ekosistem yang kondusif bagi evaluasi kurikulum berbasis data dan kolaborasi yang efektif.

Saat ini, salah satu kesenjangan kebijakan utama adalah ketidaaan regulasi yang mewajibkan penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan kurikulum. Meskipun ada imbauan atau panduan, tidak ada peraturan yang mengikat secara hukum dan memiliki konsekuensi yang jelas jika tidak dipatuhi. Akibatnya, universitas memiliki kebebasan untuk mengabaikan evaluasi berbasis data dan terus mengandalkan metode konvensional yang tidak lagi relevan.

Oleh karena itu, esensi dari solusi yang diusulkan dalam makalah kebijakan ini adalah urgensi regulasi berbasis data. Konsep ini berbeda dari regulasi biasa karena tidak hanya menetapkan "apa" yang harus dilakukan (misalnya, merevisi kurikulum), tetapi juga "bagaimana" cara melakukannya, yaitu dengan menggunakan data yang valid dan terukur. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip analisis kebijakan publik yang modern, di mana kebijakan harus didukung oleh bukti empiris (Dunn, 2018).

Regulasi berbasis data akan menjadi fondasi bagi manajemen kurikulum yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya data yang terintegrasi dan dapat diakses, setiap pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan universitas hingga mahasiswa, dapat melihat secara jelas bagaimana kurikulum memengaruhi prospek karier lulusan. Transparansi ini akan menciptakan tekanan positif bagi institusi untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri.

Salah satu elemen kunci dari regulasi ini adalah implementasi Sistem Informasi Manajemen Lulusan (SIM-Lulusan) yang terintegrasi. Sistem ini akan berfungsi sebagai "jantung" dari seluruh proses evaluasi, di mana data dari berbagai sumber (seperti alumni, pemberi kerja, dan asosiasi profesi) dapat disatukan dalam satu platform. Tanpa sistem yang terpusat, data akan tetap tersebar dan tidak dapat dianalisis secara efektif.

Namun, sistem informasi saja tidak cukup. Diperlukan juga unit khusus yang memiliki keahlian untuk mengolah dan menganalisis data tersebut menjadi wawasan yang berguna. Unit ini akan bertindak sebagai "otak" dari sistem evaluasi, mengubah data mentah menjadi rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh program studi untuk meningkatkan relevansi kurikulum.

Keterbatasan dalam kompetensi analitis di kalangan staf dan dosen menjadi salah satu alasan kuat mengapa unit khusus ini sangat diperlukan. Unit ini dapat diisi oleh para ahli yang tidak hanya memahami metodologi riset, tetapi juga dapat menerjemahkan temuan-temuan tersebut ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh para perancang kurikulum (Santoso & Purnomo, 2020).

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh PTKI, khususnya UIN Jurai Siwo Lampung, adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di tingkat nasional. Kurikulum yang tidak relevan, birokrasi yang lambat, dan kurangnya kolaborasi dengan industri menciptakan hambatan sistemik yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan yang kuat.

Momentum untuk reformasi ini sangat tepat. Dengan semakin ketatnya persaingan di pasar kerja dan tuntutan akan talenta yang spesifik, kegagalan dalam bertindak sekarang akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar di masa depan. Regulasi berbasis data bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan PTKI tetap relevan dan berkontribusi secara nyata pada pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, makalah kebijakan ini bertujuan untuk menyajikan argumentasi yang kuat bahwa regulasi berbasis data adalah jalan strategis yang harus diambil oleh Dirjen Pendis untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, dan menjadikan PTKI sebagai institusi yang tidak hanya mencetak cendekiawan berakhhlak mulia, tetapi juga profesional yang kompetitif dan siap kerja..

## **Identifikasi Masalah**

### 1. Kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan industri

Masalah ini berfokus pada ketidaksesuaian antara materi ajar yang diberikan di UIN Jurai Siwo Lampung dengan kompetensi praktis yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Kurikulum yang terlalu teoritis atau tidak diperbarui secara berkala akan menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Wahyudi, S., & Susanto, R. (2020).

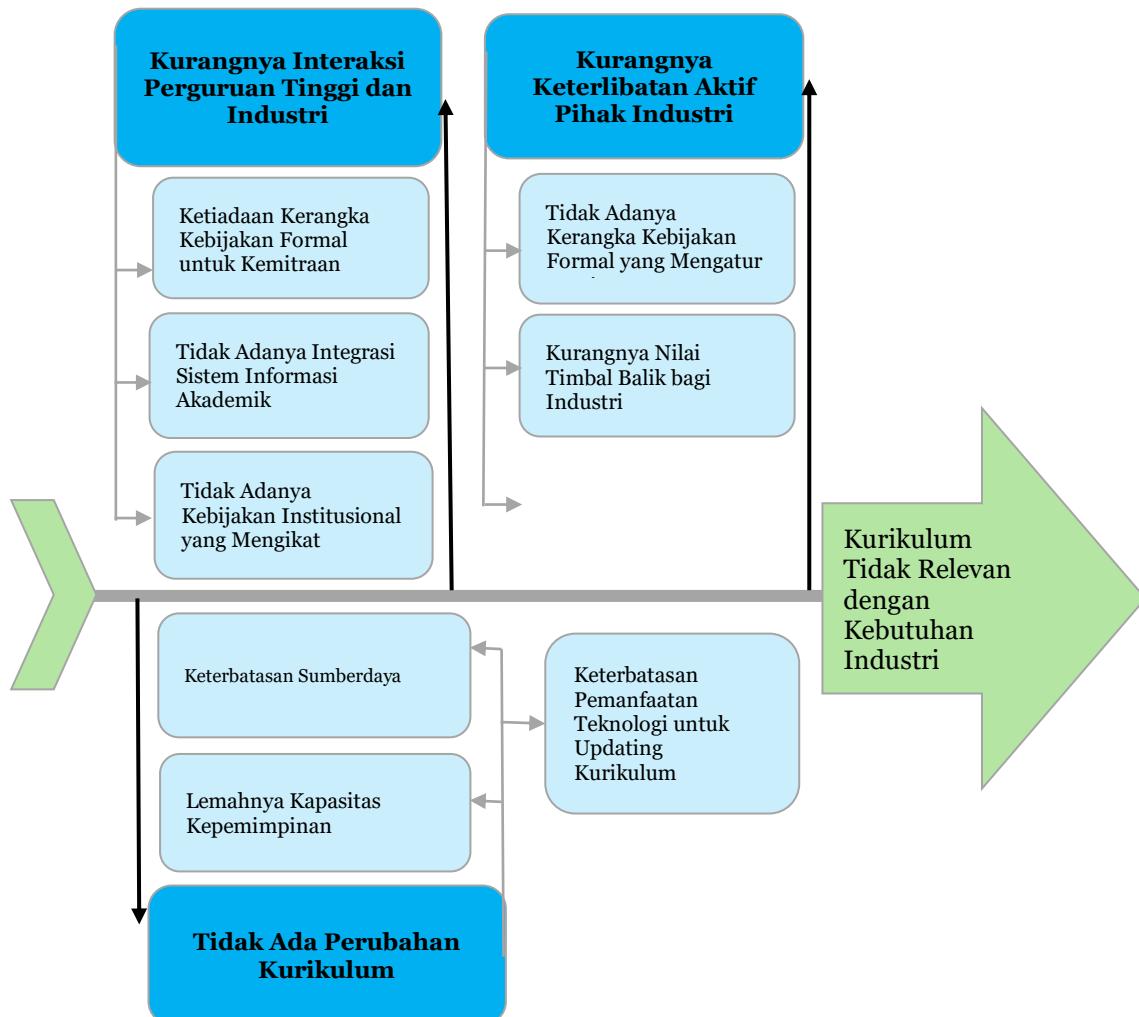
### 2. Lemahnya kolaborasi antara universitas dan industri

Masalah ini menyoroti kurangnya kemitraan strategis antara UIN Jurai Siwo Lampung dengan berbagai perusahaan atau organisasi. Kolaborasi yang minim, seperti program magang yang tidak efektif, kunjungan industri yang jarang, atau proyek bersama yang langka, menyebabkan lulusan tidak memiliki pengalaman kerja yang memadai dan wawasan tentang dinamika pasar. Mulyono, B., & Handayani, T. (2021).

### 3. Kualitas dosen serta tenaga pengajar yang kurang kompeten

Isu ini berfokus pada keterbatasan kompetensi dosen dalam memberikan pengajaran yang sesuai dengan tuntutan pasar. Tidak hanya kualitas, tetapi juga kuantitas dosen yang memiliki keahlian praktis atau pengalaman di industri sering kali menjadi kendala. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan yang ditransfer kepada mahasiswa. Santoso, A., & Purnomo, J. (2020).

Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “pohon masalah”, baik dalam bentuk *flowchart* atau menggunakan teori, seperti *fishbone* dalam makalah ini di gunakan diagram *fishbone*:



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

Kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Teori USG ini membantu seseorang atau organisasi dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya, dengan mempertimbangkan seberapa mendesak (*urgency*) suatu ide atau proyek untuk ditangani, seberapa serius (*seriousness*) dampak negatif yang mungkin timbul jika tidak ditangani, dan seberapa besar potensi pertumbuhan atau manfaat (*growth*) yang dapat dihasilkan jika ide atau proyek tersebut berhasil diimplementasikan. Dengan mengevaluasi setiap ide atau proyek berdasarkan ketiga dimensi ini, seseorang/organisasi dapat memprioritaskan inisiatif yang paling kritis dan memiliki potensi dampak terbesar bagi pencapaian tujuan organisasi.

**Tabel 5.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth*

Masalah Kebijakan	U	S	G	Total	Keterangan/Analisis
1. Kurikulum Tidak Relevan dengan Kebutuhan Industri	5	5	5	<b>15</b>	Isu ini sangat mendesak (U=5) karena setiap semester ada lulusan baru yang masuk ke pasar kerja dengan kompetensi yang tidak sesuai. Dampaknya sangat serius (S=5) karena langsung memengaruhi daya serap lulusan secara massal. Tren industri yang terus berubah membuat kesenjangan ini akan tumbuh sangat cepat (G=5) jika tidak segera diperbaiki.
2. Lemahnya Kolaborasi Antara Universitas dan Industri	4	4	4	12	Masalah ini mendesak (U=4) karena kesempatan mahasiswa untuk magang dan mendapatkan pengalaman kerja praktis terus berkurang. Dampaknya serius (S=4) karena lulusan kekurangan pengalaman praktis dan jaringan profesional. Pertumbuhan (G=4) akan semakin pesat seiring dengan tuntutan industri terhadap lulusan yang siap kerja.
3. Kualitas dan Kuantitas Dosen serta Tenaga Pengajar yang Tidak Memadai	3	5	4	12	Meskipun merupakan akar masalah, penanganannya tidak secepat kurikulum (U=3). Namun, dampaknya sangat serius (S=5) karena dosen adalah ujung tombak transfer pengetahuan. Pertumbuhan masalah ini juga akan pesat (G=4) seiring dengan percepatan teknologi dan industri yang menuntut kompetensi dosen yang terus diperbarui.

Hasil tabel hasil skoring di atas “hanya” untuk mengetahui “nilai” masalah yang memiliki tingkat USG yang paling tinggi untuk dijadikan *problem statement*, tidak perlu dimunculkan sebagai bagian dari isi artikel (*tabel cukup dicantumkan sebagai lampiran di akhir halaman artikel*).

### Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* yang di-highlight pada makalah kebijakan ini bahwa Kurikulum yang tidak Relevan dengan Kebutuhan Industri disebabkan kurangnya interaksi antara perguruan tinggi dan sektor industri, yang utamanya disebabkan oleh belum adanya kebijakan formal yang mengatur kemitraan strategis.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

ujuan utama dari kajian ini adalah untuk menyediakan landasan teoretis dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi kesenjangan kompetensi lulusan di UIN Jurai Siwo Lampung. Secara lebih rinci, tujuan kajian ini meliputi:

1. Menganalisis secara mendalam akar masalah yang menyebabkan kesenjangan antara kurikulum UIN Jurai Siwo Lampung dan kebutuhan pasar tenaga kerja modern.
2. Merumuskan dan mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah yang ada.

3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret dan strategis untuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI, guna mendorong reformasi kurikulum yang berbasis data dan relevan dengan industri.
4. Mengkaji urgensi pembentukan regulasi yang bersifat mengikat dan sistemik, sebagai prasyarat utama untuk keberhasilan implementasi perubahan di tingkat universitas.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

1. Bagi UIN Jurai Siwo Lampung: Kajian ini berfungsi sebagai panduan strategis bagi pimpinan universitas dalam merancang dan mengimplementasikan reformasi tata kelola dan kurikulum. Dengan mengikuti rekomendasi, universitas dapat meningkatkan relevansi program studi, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja.
2. Bagi Dirjen Pendis Kementerian Agama RI: Hasil kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan nasional yang lebih luas terkait pendidikan tinggi keagamaan. Rekomendasi yang disajikan dapat menjadi model kebijakan yang dapat diterapkan di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia.
3. Bagi lulusan: Implementasi kebijakan dari kajian ini akan secara langsung meningkatkan kualitas kompetensi lulusan, mempersingkat waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, dan mengurangi tingkat pengangguran terdidik.
4. Bagi dunia industri: Kajian ini membantu dunia usaha dan dunia kerja dalam mengidentifikasi potensi kolaborasi dengan PTKI, serta memastikan bahwa sumber daya manusia yang direkrut dari UIN Jurai Siwo Lampung memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan riil industri.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual dalam artikel kebijakan publik merupakan landasan analitis yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi isu kebijakan yang diangkat.

### Kerangka Teori

1. Teori kelembagaan (*institutional theory*)

Teori kelembagaan menjelaskan bagaimana norma, aturan, dan struktur dalam suatu sistem sosial memengaruhi perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks ini, ketiadaan kerangka kebijakan formal merupakan kekosongan kelembagaan (*institutional void*). Ini berarti tidak ada aturan main yang jelas atau lembaga yang memiliki mandat untuk mendorong kemitraan strategis. Akibatnya, baik universitas maupun industri bertindak secara independen, yang memperburuk kesenjangan dan membuat kurikulum tidak responsif terhadap kebutuhan pasar. Scott, W. R. (2014).

2. Teori jaringan kebijakan (*policy network theory*)

Teori ini melihat proses pembuatan kebijakan sebagai interaksi antara berbagai aktor dalam suatu jaringan. Lemahnya hubungan antara perguruan tinggi dan industri menunjukkan bahwa jaringan kebijakan (policy network) di sektor pendidikan-industri sangat terfragmentasi dan lemah. Tanpa adanya simpul yang kuat (misalnya, pemerintah atau asosiasi industri) yang dapat menyatukan berbagai aktor, tidak akan ada konsensus atau koordinasi untuk merumuskan kebijakan kemitraan. Ini menciptakan ketidakselarasan antara pasokan (lulusan) dan permintaan (industri). Marsh, D., & Smith, M. J. (2000).

3. Teori modal sosial (*social capital theory*)

Modal sosial mengacu pada nilai dari jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang memungkinkan individu atau organisasi untuk bekerja sama secara efektif. Ketiadaan kerangka kebijakan formal mencerminkan modal sosial yang rendah antara perguruan tinggi dan industri. Tanpa adanya kepercayaan dan norma kerja sama yang terlembagakan, kedua belah pihak akan enggan untuk berinvestasi waktu dan sumber daya dalam kemitraan. Akibatnya, jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja tidak terbangun, dan kurikulum tetap statis. Putnam, R. D. (2000).

4. Teori *public policy failure* (kegagalan kebijakan publik)

Teori ini menjelaskan mengapa kebijakan yang ada gagal atau mengapa tidak ada kebijakan sama sekali untuk mengatasi masalah publik. Dalam konteks ini, ketiadaan kebijakan formal untuk kemitraan adalah contoh nyata dari kegagalan kebijakan. Kegagalan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tetapi juga oleh ketidakmampuan struktural dan kelembagaan untuk mengenali dan memformulasikan solusi. Tanpa adanya kebijakan, masalah kesenjangan kurikulum akan terus ada, dan perguruan tinggi tidak dapat memenuhi perannya dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten. Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2019).

5. Konsep *problem definition* (pendefinisian masalah)

Konsep ini menekankan bahwa cara suatu masalah didefinisikan akan sangat memengaruhi solusi yang diusulkan. Lemahnya kerangka kebijakan bisa jadi disebabkan karena para pembuat kebijakan tidak mendefinisikan masalah ini sebagai kegagalan sistemik yang membutuhkan intervensi strategis. Mereka mungkin hanya melihatnya sebagai masalah teknis di kurikulum atau kurangnya inisiatif dari pihak kampus. Pendefinisian masalah yang salah atau sempit ini mengarah pada kurangnya respons kebijakan yang komprehensif, sehingga akar permasalahan tidak pernah tersentuh. Kingdon, J. W. (2011).

## **Kerangka Konseptual**

1. Konsep *human capital theory* (teori modal manusia)

Konsep ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan industri adalah kegagalan dalam membangun modal manusia yang relevan. Tanpa kerangka kebijakan yang memfasilitasi kemitraan, perguruan tinggi gagal menghasilkan lulusan dengan modal manusia yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga investasi dalam pendidikan menjadi kurang efisien dan tidak optimal. Becker, G. S. (1993).

2. Konsep *institutional void* (kekosongan kelembagaan)

*Institutional Void* mengacu pada situasi di mana tidak ada aturan, norma, atau lembaga yang memadai untuk mengatur suatu interaksi atau masalah tertentu. Dalam isu kemitraan pendidikan-industri, kekosongan kelembagaan terjadi karena tidak adanya kebijakan formal yang menjadi "jembatan" antara kedua sektor. Kekosongan ini menyebabkan tidak ada yang secara jelas bertanggung jawab atau memiliki mekanisme untuk mendorong kolaborasi, sehingga hubungan antara perguruan tinggi dan industri bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Mair, J., & Marti, I. (2009).

3. Konsep *stakeholder theory* (teori pemangku kepentingan)

Konsep ini menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemegang sahamnya, tetapi juga oleh semua pihak yang memiliki kepentingan dalam operasi organisasi, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Dalam konteks ini, ketiadaan kemitraan strategis menunjukkan kegagalan perguruan tinggi untuk mengelola hubungan dengan salah satu pemangku kepentingan terpentina: industri. Mengabaikan kebutuhan industri dapat merusak reputasi universitas dan mengurangi relevansi lulusannya. Bryson, J. M. (2018).

4. Konsep *dynamic capabilities* (kemampuan dinamis)

Dynamic Capabilities adalah kemampuan suatu organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat. Dalam kasus ini, kurikulum yang tidak relevan menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak memiliki kemampuan dinamis yang memadai untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri. Ketiadaan kerangka kebijakan formal merupakan hambatan struktural yang mencegah perguruan tinggi untuk secara proaktif mengintegrasikan pengetahuan dan tren dari industri ke dalam kurikulum mereka. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2022).

5. Konsep *problem definition* (pendefinisian masalah)

Konsep ini menunjukkan bahwa cara suatu masalah didefinisikan akan sangat memengaruhi solusi yang dipilih. Ketiadaan kerangka kebijakan formal bisa jadi disebabkan karena para pembuat kebijakan tidak mendefinisikan masalah ini sebagai kegagalan sistemik yang membutuhkan intervensi strategis. Mereka mungkin hanya melihatnya sebagai masalah teknis di kurikulum atau kurangnya inisiatif dari pihak kampus. Pendefinisian masalah yang sempit ini mengarah pada kurangnya respons kebijakan yang komprehensif, sehingga akar permasalahan tidak pernah tersentuh. Kingdon, J. W. (2011).

## METODOLOGI

Penulisan artikel kebijakan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan sistemik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami masalah secara holistik dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar berbagai faktor yang kompleks, alih-alih hanya berfokus pada gejala-gejala masalah (Howlett & Ramesh, 2003). Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap isu-isu kelembagaan, proses, dan kebijakan yang menjadi akar dari kesenjangan kompetensi lulusan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Kajian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, laporan, dan literatur yang relevan. Data primer tidak dikumpulkan dalam kajian ini. Sumber-sumber data meliputi:

1. Dokumen resmi dan peraturan pemerintah: Laporan dari Bappenas dan Kementerian terkait, serta regulasi seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Dirjen Pendis yang mengatur tata kelola dan kurikulum pendidikan tinggi.
2. Laporan organisasi internasional: Dokumen dari World Bank, OECD, dan UNESCO yang membahas isu pendidikan tinggi, pasar kerja, dan pembangunan sumber daya manusia.
3. Literatur akademik: Jurnal ilmiah, buku, dan disertasi yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan, teori modal manusia, dan reformasi birokrasi di lingkungan perguruan tinggi.

### **Prosedur Analisis**

Prosedur analisis dalam tulisan ini terbagi menjadi beberapa tahapan sistematis, sebagai berikut:

1. Identifikasi dan perumusan masalah: Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama, yaitu kesenjangan kompetensi lulusan UIN Jurai Siwo Lampung dengan kebutuhan pasar kerja, melalui tinjauan literatur dan analisis konteks institusional.
2. Analisis akar masalah: Masalah diuraikan ke dalam beberapa faktor penyebab utama. Analisis ini menggunakan kerangka analitis sebab-akibat untuk memetakan hubungan antara gejala dan akar masalah, seperti kurangnya data, kelambatan birokrasi, dan minimnya kolaborasi.
3. Perumusan alternatif kebijakan: Berdasarkan akar masalah yang telah teridentifikasi, dirumuskan lima alternatif kebijakan yang potensial untuk menjadi solusi. Alternatif ini diformulasikan dalam bentuk regulasi yang bersifat mengikat dan sistemik.
4. Analisis dan evaluasi alternatif: Setiap alternatif kebijakan dievaluasi secara komparatif menggunakan kerangka analisis William N. Dunn (Dunn, 2018). Kriteria yang digunakan meliputi:
  - Efektivitas: Sejauh mana kebijakan akan mencapai tujuannya.
  - Efisiensi: Rasio antara biaya non-finansial dan hasil yang dicapai.
  - Kecukupan: Sejauh mana kebijakan dapat mengatasi seluruh cakupan masalah.
  - Pemerataan: Sejauh mana manfaat didistribusikan secara adil.
  - Responsivitas: Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
5. Perumusan rekomendasi kebijakan: Alternatif kebijakan dengan skor evaluasi tertinggi dipilih dan diuraikan lebih lanjut sebagai rekomendasi utama. Rekomendasi ini disajikan secara spesifik dan terperinci, ditujukan kepada otoritas pembuat kebijakan yang relevan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis skoring terhadap lima alternatif kebijakan yang telah diuraikan, ditemukan bahwa tidak ada satu pun alternatif yang secara tunggal mampu menjadi solusi paripurna. Evaluasi menggunakan kerangka Dunn menunjukkan bahwa skor tertinggi dicapai oleh Pemberlakuan Sistem Tata Kelola Universitas melalui Desentralisasi Perubahan Kurikulum dan Penerbitan Perdirjen Pendis tentang Pemberlakuan Kemitraan Strategis. Kedua kebijakan ini dinilai memiliki potensi tertinggi untuk mengatasi akar masalah secara efektif dan holistik. Hasil ini menunjukkan bahwa solusi terbaik bukanlah salah satu di antara keduanya, melainkan integrasi strategis dari keduanya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif Desentralisasi Perubahan Kurikulum mendapatkan skor tertinggi (23), terutama karena efektivitasnya dalam mengatasi hambatan birokrasi. Kebijakan ini secara langsung memotong rantai birokrasi yang panjang, yang selama ini menjadi penghalang utama bagi adaptasi kurikulum yang cepat. Dengan memberikan otonomi kepada tingkat fakultas dan program studi, proses pengambilan keputusan menjadi lebih lincah dan responsif terhadap masukan dari lapangan (Howlett & Ramesh, 2003).

Dari segi efisiensi, desentralisasi memiliki skor yang tinggi (4) karena meskipun memerlukan penyesuaian awal dalam tata kelola, kebijakan ini akan menghemat waktu dan sumber daya dalam jangka panjang. Biaya administrasi yang besar dan waktu yang terbuang dalam prosedur persetujuan berjenjang akan berkurang drastis, memungkinkan energi institusi difokuskan pada inovasi substansial dalam kurikulum. Ini adalah investasi awal yang memberikan pengembalian signifikan dalam hal efektivitas dan kecepatan (Dunn, 2018).

Aspek kecukupan dan responsivitas pada kebijakan desentralisasi juga menunjukkan skor yang sangat baik. Kebijakan ini secara langsung menjawab kebutuhan mendesak akan kelincahan institusional. Dengan demikian, UIN Jurai Siwo Lampung dapat secara mandiri menyesuaikan kurikulumnya tanpa harus menunggu instruksi atau persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dari bawah ke atas.

Namun, perlu dicatat bahwa desentralisasi saja tidak menjamin relevansi. Otonomi tanpa masukan yang valid dapat berisiko menghasilkan kurikulum yang bervariasi namun tetap tidak relevan. Oleh karena itu, kebijakan ini hanya akan optimal jika disandingkan dengan mekanisme yang menjamin bahwa perubahan kurikulum yang didesentralisasikan didasarkan pada data dan masukan yang akurat.

Di sinilah peran alternatif kebijakan kedua, yaitu Penerbitan Perdirjen Pendis tentang Pemberlakuan Kemitraan Strategis, menjadi sangat krusial. Kebijakan ini secara spesifik mengatasi akar masalah kurangnya kolaborasi dengan industri. Dengan adanya peraturan yang mengikat, kemitraan tidak lagi hanya menjadi pilihan, melainkan menjadi kewajiban yang terstruktur dan terlembaga.

Kebijakan kemitraan strategis dinilai sangat efektif karena menyediakan saluran langsung bagi industri untuk memberikan umpan balik pada kurikulum. Melalui dewan penasihat yang beranggotakan praktisi, kurikulum dapat dirancang dengan wawasan terkini mengenai tren pasar kerja dan kebutuhan keterampilan yang nyata. Hal ini secara langsung menutup kesenjangan antara teori akademis dan praktik profesional (World Bank, 2018).

Dari sisi pemerataan, kebijakan ini memastikan bahwa semua program studi dan seluruh mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap manfaat dari kolaborasi industri. Dengan adanya kerangka kerja formal, tidak akan ada lagi program studi yang tertinggal karena tidak memiliki koneksi pribadi. Setiap mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari praktisi, baik melalui magang, proyek bersama, atau sesi kuliah tamu.

Selain itu, responsivitas kebijakan kemitraan strategis sangat tinggi karena secara langsung memenuhi harapan pemangku kepentingan, yaitu pasar kerja dan mahasiswa. Kebijakan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa UIN Jurai Siwo Lampung serius dalam menyiapkan lulusannya untuk tantangan di dunia nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan industri tetapi juga daya tarik universitas bagi calon mahasiswa.

Berdasarkan analisis ini, kesimpulan utama adalah bahwa solusi paling optimal adalah mengintegrasikan kedua kebijakan terpilih. Desentralisasi menyediakan fleksibilitas dan kecepatan yang dibutuhkan, sementara kemitraan strategis menyediakan arah dan relevansi yang diperlukan. Tanpa fleksibilitas, masukan dari industri tidak dapat diimplementasikan; tanpa masukan dari industri, fleksibilitas tidak memiliki dasar yang kuat. Keduanya adalah dua sisi dari satu koin yang sama.

Strategi implementasi yang direkomendasikan adalah pendekatan bertahap. Dimulai dengan penerbitan Perdirjen Pendis yang mewajibkan kemitraan strategis sebagai payung hukum. Secara bersamaan, UIN Jurai Siwo Lampung dapat memulai proses desentralisasi wewenang kurikulum secara internal, dimulai dari fakultas atau program studi percontohan yang memiliki kesiapan lebih tinggi. Pendekatan ini akan meminimalkan risiko dan memberikan ruang untuk penyesuaian (Santoso & Purnomo, 2020).

Tantangan dalam implementasi tentu akan muncul. Resiko utama adalah resistensi internal dari dosen dan staf yang terbiasa dengan sistem lama. Oleh karena itu, penting untuk menyertakan program pelatihan dan insentif yang jelas, yang menghargai keterlibatan dosen dalam kolaborasi industri. Kepemimpinan yang kuat dan komunikasi yang transparan dari rektorat sangat penting untuk mengatasi hambatan ini (DiMaggio & Powell, 1983).

Pelaksanaan strategi terpadu ini akan menempatkan UIN Jurai Siwo Lampung sebagai pionir di antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Dengan memimpin reformasi yang berani, universitas dapat menjadi model percontohan yang menunjukkan bagaimana institusi pendidikan tinggi keagamaan dapat memenuhi mandat dualnya: mencetak cendekiawan yang berakhlak mulia sekaligus profesional yang kompetitif dan siap kerja.

Pada akhirnya, hasil analisis ini menggarisbawahi bahwa masalah kesenjangan kompetensi bukan sekadar isu teknis, melainkan masalah tata kelola dan kebijakan. Solusinya tidak terletak pada penambahan kegiatan atau program, melainkan pada transformasi struktural yang didorong oleh regulasi yang kuat. Regulasi ini akan menciptakan ekosistem di mana data, kolaborasi, dan kelincahan birokrasi bekerja sama secara sinergis untuk menghasilkan lulusan yang relevan.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini, UIN Jurai Siwo Lampung tidak hanya akan menyelesaikan masalah internalnya, tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia di tingkat regional maupun nasional. Ini adalah langkah fundamental menuju visi "Jalan Menuju Lulusan Siap Kerja" yang berkelanjutan dan terukur.

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, integrasi kebijakan desentralisasi dan kemitraan strategis bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Implementasi kedua kebijakan ini memerlukan perencanaan yang matang, dimulai dari penyusunan mekanisme operasional yang jelas. Untuk desentralisasi, perlu dibuat pedoman yang merinci jenis-jenis perubahan kurikulum yang dapat disetujui di tingkat fakultas dan program studi, serta prosedur persetujuan yang disederhanakan dan berbasis digital. Hal ini akan memastikan otonomi yang diberikan tetap terstruktur dan terukur.

Pelaksanaan kebijakan ini juga membutuhkan dukungan dari Unit Khusus Analisis Kurikulum yang sebelumnya diusulkan. Unit ini akan berfungsi sebagai jembatan antara dunia industri dan pihak akademis. Tugas utamanya adalah mengolah data dari kemitraan strategis dan dari sistem informasi lulusan, kemudian menerjemahkan temuan tersebut menjadi laporan dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh para kepala program studi. Dengan demikian, data tidak hanya sekadar terkumpul, tetapi juga menjadi dasar bagi setiap keputusan kurikulum yang dibuat.

Tentu saja, implementasi ini tidak gratis. Diperlukan alokasi sumber daya yang memadai, baik dari anggaran internal universitas maupun melalui dana hibah eksternal. Anggaran ini akan dialokasikan untuk pembentukan unit khusus, pengembangan atau pengadaan sistem informasi terpadu, serta program pelatihan bagi dosen dan staf. Investasi ini harus dilihat sebagai modal strategis untuk meningkatkan daya saing institusi dalam jangka panjang, bukan sekadar biaya operasional rutin.

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perubahan dalam sistem insentif bagi dosen. Kebijakan harus secara eksplisit mengakui dan memberikan penghargaan (misalnya melalui kredit poin dalam promosi jabatan) atas keterlibatan dosen dalam proyek industri, riset kolaboratif, atau pencapaian sertifikasi profesional. Hal ini akan memotivasi dosen untuk secara aktif mencari pengalaman praktis dan memperkaya materi ajar mereka dengan pengetahuan yang relevan dengan pasar kerja (Wahyudi & Susanto, 2022).

Selain itu, kepemimpinan transformasional dari pimpinan universitas menjadi faktor penentu. Rektorat harus secara konsisten menunjukkan komitmennya terhadap reformasi ini, tidak hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Kemampuan pemimpin dalam mengelola perubahan, mengatasi resistensi, dan menginspirasi seluruh civitas akademika untuk berkolaborasi adalah kunci untuk mengubah kebijakan di atas kertas menjadi realitas di lapangan (Fullan, 2016).

Penting juga untuk melibatkan mahasiswa dan alumni sebagai mitra strategis. Mereka bukanlah sekadar objek kebijakan, melainkan sumber data dan umpan balik yang paling berharga. Kebijakan harus membuka saluran komunikasi formal agar mahasiswa dapat memberikan masukan langsung terkait relevansi kurikulum, sementara alumni dapat menjadi "duta" yang menghubungkan universitas dengan sektor industri.

Lebih dari sekadar membenahi kurikulum, implementasi kebijakan ini akan membawa dampak ekonomi lokal yang signifikan. Dengan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap kerja, UIN Jurai Siwo Lampung akan meningkatkan ketersediaan talenta lokal bagi perusahaan-perusahaan di Lampung dan sekitarnya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menarik investasi baru yang membutuhkan sumber daya manusia berkualitas.

Model kebijakan ini memiliki potensi replikasi yang tinggi di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia. Masalah kesenjangan kompetensi bukan unik bagi UIN Jurai Siwo Lampung, melainkan tantangan yang dihadapi oleh banyak PTKI lainnya. Oleh karena itu, kerangka kerja kebijakan yang terbukti berhasil dapat menjadi

*A Path to Job-Ready Graduates: The Urgency of Curriculum Regulation to Overcome the Competency Gap at State Islamic University (UIN) Jurai Siwo Lampung; [365-388]; Supendi*  
cetak biru yang diadopsi dan disesuaikan oleh institusi lain, menciptakan dampak positif yang lebih luas di tingkat nasional.

Secara makro, reformasi ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dan kompetitif. Dengan berfokus pada relevansi kurikulum dan kolaborasi, PTKI tidak hanya akan memenuhi misinya dalam pendidikan keagamaan tetapi juga secara langsung berkontribusi pada pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja dan produktivitas nasional (Bappenas, 2020).

Meskipun demikian, ada beberapa keterbatasan dan tantangan yang harus diantisipasi. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran. Implementasi sistem terpadu dan pembentukan unit khusus memerlukan pendanaan yang substansial. Solusinya dapat berupa pengajuan proposal hibah kompetitif dari pemerintah atau lembaga donor internasional, serta eksplorasi model pembiayaan berkelanjutan lainnya.

Tantangan lainnya adalah resistensi budaya. Dosen dan staf yang sudah nyaman dengan sistem lama mungkin menolak perubahan. Untuk mengatasinya, perlu adanya strategi manajemen perubahan yang komprehensif, termasuk sosialisasi yang masif, pelatihan berkelanjutan, dan demonstrasi keberhasilan awal untuk membangun momentum dan meyakinkan semua pihak.

Ada juga risiko mis-implementasi, di mana kebijakan hanya diterapkan secara formal tanpa perubahan substansial. Untuk mencegahnya, kebijakan harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi (M&E) yang ketat dan transparan. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Pada akhirnya, hasil dan pembahasan ini menyimpulkan bahwa kunci untuk mengatasi masalah kesenjangan kompetensi terletak pada pendekatan terintegrasi. Solusi yang efektif tidak hanya memperbaiki satu aspek, melainkan menciptakan sebuah ekosistem yang saling mendukung. Desentralisasi dan kemitraan strategis adalah dua pilar utama dari ekosistem ini.

Dengan mengadopsi model kebijakan ini, UIN Jurai Siwo Lampung memiliki kesempatan untuk menjadi pusat keunggulan yang tidak hanya diakui secara akademis, tetapi juga secara praktis relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Ini adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi keagamaan tidak hanya menghasilkan ulama dan cendekiawan, tetapi juga profesional yang siap memimpin di berbagai sektor.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa dengan adanya political will dari pimpinan dan regulasi yang tepat, sebuah institusi pendidikan tinggi mampu bertransformasi menjadi agen perubahan yang proaktif, berani berinovasi, dan pada akhirnya, menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun global.

## **Analisis Kebijakan**

### **1. Analisis stakeholder (*stakeholder analysis*)**

Analisis ini mengidentifikasi para pihak yang terlibat atau terdampak oleh masalah kebijakan, serta kepentingan dan pengaruhnya masing-masing. Dalam kasus ini, stakeholder utama meliputi mahasiswa, dosen, pimpinan universitas, alumni, industri lokal, dan pemerintah daerah. Kesenjangan antara harapan industri (mencari talenta kompeten) dan kapasitas universitas (kurikulum yang tidak

relevan) adalah inti dari masalah ini. Analisis kebijakan ini akan memetakan bagaimana kepentingan yang berbeda ini berinteraksi dan menyebabkan stagnasi. Bryson, J. M. (2004).

2. Analisis efektivitas (*effectiveness analysis*)

Analisis ini mengukur sejauh mana sebuah kebijakan atau program mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang siap kerja. Dengan adanya kesenjangan kompetensi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum yang ada tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis ini akan mengukur inefektivitas ini melalui data seperti tingkat serapan lulusan, gaji awal, atau masukan dari survei pemberi kerja. Dunn, W. N. (2018).

3. Analisis keterkaitan dan kausalitas (*linkage and causality analysis*)

Analisis ini berfokus pada hubungan sebab-akibat antara masalah-masalah yang ada. Analisis ini membantu mengonfirmasi bahwa kurangnya evaluasi berbasis data (penyebab) secara langsung berkontribusi pada kurikulum yang tidak relevan (masalah). Analisis ini juga dapat menunjukkan bagaimana kurangnya keterlibatan industri memperburuk masalah utama, menciptakan siklus masalah yang saling terkait. Pal, L. A. (2014).

4. Analisis kelayakan dan implementasi (*feasibility and implementation analysis*)

Analisis ini mengevaluasi apakah sebuah solusi kebijakan dapat diterapkan secara praktis di lapangan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor non-finansial. Dalam kasus ini, analisis ini akan menguji apakah usulan reformasi kurikulum, meskipun ideal, dapat diimplementasikan mengingat hambatan birokrasi dan budaya resistensi di UIN Jurai Siwo Lampung. Analisis ini membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan non-moneter yang mungkin muncul saat implementasi. Howlett, M., & Ramesh, M. (2003).

5. Analisis perbandingan (*comparative analysis*)

Analisis ini membandingkan kebijakan atau program yang ada di satu institusi dengan institusi lain yang dianggap berhasil. Anda dapat membandingkan UIN Jurai Siwo Lampung dengan perguruan tinggi lain yang dikenal memiliki kurikulum yang responsif terhadap pasar (misalnya, melalui program magang wajib, dewan penasihat industri yang aktif, atau sistem evaluasi berbasis data). Analisis ini memberikan bukti praktik terbaik dan model-model yang dapat diadopsi. Majone, G. (1989).

Analisis kebijakan di atas didukung oleh peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan ini menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Pasal-pasal di dalamnya menekankan perlunya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Peraturan ini secara eksplisit mendorong perguruan tinggi untuk beradaptasi dengan tuntutan global dan nasional, yang secara implisit memerlukan evaluasi kurikulum berbasis data.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

Peraturan ini menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu standarnya adalah Standar Kompetensi Lulusan, yang mewajibkan setiap lulusan memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan standar ini tercapai, perguruan tinggi harus melakukan evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara berkala.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kampus Merdeka)

Peraturan ini, yang menjadi dasar kebijakan Kampus Merdeka, mendorong perguruan tinggi untuk lebih fleksibel dan kolaboratif. Pasal-pasalnya memberikan landasan hukum bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi atau kampus, termasuk magang di industri. Hal ini secara langsung menggarisbawahi pentingnya kurikulum yang relevan dan kolaborasi aktif dengan pihak luar untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum

Peraturan ini mengatur otonomi pengelolaan perguruan tinggi, termasuk dalam pengembangan kurikulum. Meskipun memberikan otonomi, peraturan ini juga menuntut akuntabilitas publik dari perguruan tinggi. Akuntabilitas ini mencakup tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan relevan. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyesuaikan kurikulum dapat dianggap sebagai indikasi lemahnya akuntabilitas institusi.

5. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama

Meskipun bukan peraturan dalam arti undang-undang, dokumen seperti Rencana Strategis Kementerian Agama yang di Turunkan menjadi Rencana Starategis Dirjen Pendis seringkali mencantumkan target untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dan mengurangi kesenjangan antara lulusan dan industri. Dokumen ini menjadi acuan kebijakan yang sah dan memberikan dasar bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan program studinya.

## **Limitasi Kajian**

Meskipun kajian ini telah berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, penting untuk menyadari adanya beberapa keterbatasan. Kajian ini bersifat non-empiris dan tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga analisis didasarkan sepenuhnya pada data sekunder, tinjauan literatur, dan dokumen-dokumen kebijakan yang tersedia. Akibatnya, rekomendasi yang diusulkan bersifat konseptual dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui riset lapangan yang mendalam. Selain itu, kajian ini terfokus secara spesifik pada konteks UIN Jurai Siwo Lampung, sehingga implementasi rekomendasi di institusi lain mungkin memerlukan penyesuaian yang cermat sesuai dengan karakteristik dan kondisi unik masing-masing perguruan tinggi. Terakhir, analisis ini mengasumsikan adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari pimpinan universitas dan otoritas di tingkat kementerian, yang merupakan prasyarat krusial untuk keberhasilan setiap reformasi kebijakan.

## Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dan kontribusi utama dari kajian ini terletak pada pendekatannya yang mengintegrasikan analisis kebijakan terstruktur dengan konteks spesifik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Berbeda dengan studi yang hanya berfokus pada analisis masalah atau perumusan solusi parsial, tulisan ini secara sistematis mengevaluasi alternatif kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk regulasi formal, bukan hanya inisiatif program. Kontribusi utamanya adalah menyediakan kerangka kerja holistik yang menghubungkan akar masalah kelembagaan (birokrasi dan budaya) dengan solusi kebijakan konkret (desentralisasi dan kemitraan strategis). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya mengidentifikasi penyebab kesenjangan kompetensi, tetapi juga menawarkan peta jalan yang terukur dan aplikatif bagi Dirjen Pendis Kementerian Agama dan pimpinan universitas untuk melakukan transformasi kelembagaan, menjadikannya model bagi PTKI lain yang menghadapi tantangan serupa.

## ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Perdirjen Pendis) tentang Pemberlakuan Kemitraan Strategis. Kebijakan ini mengatur kerangka kerja kolaborasi dan mekanisme kemitraan strategis.

Alternatif 2: Surat Keputusan Rektor tentang Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Proyek (PBL). Kebijakan ini mengatur kebutuhan Project-Based Learning (PBL), supervisi dosen dan mentor dari industri dan Penilaian kompetensi.

Alternatif 3: Surat Keputusan Dirjen Pendis tentang Penelitian Kurikulum Berbasis Peluang Industri. Kebijakan ini mengatur proses perancangan kurikulum dari inisiatif internal yang pasif menjadi proses yang proaktif dan didorong oleh bukti empiris dari pasar kerja..

## Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya kriteria evaluasi dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.
- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.

- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Alternatif Kebijakan	Skor Efektivitas (0.35)	Skor Kelayakan Teknis (0.25)	Skor Kelayakan Politik (0.20)	Skor Kelayakan Administratif (0.20)	Total Skor
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Perdirjen Pendis) tentang Pemberlakuan Kemitraan Strategis	5 (1.75)	4 (1.25 b)	4 (1.25)	3 (0.75)	4.00
Surat Keputusan Rektor Pemberlakukan Implementasi Kurikulum Berbasis Proyek (PBL)	3 (1.050)	3 (0.75)	2 (0.40)	2 (0.60)	3.15
Surat Keputusan Dirjen Pendis tentang Penelitian Kurikulum Berbasis Peluang Industri	4 (1.40)	3 (0.75)	2 (0.40)	2 (0.60)	3.35

Berdasarkan hasil scoring alternatif kebijakan pada tabel di atas, Alternatif terbaik adalah Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Perdirjen Pendis) tentang Pemberlakuan Kemitraan Strategis dapat menjadi langkah konkret pertama yang langsung dijalankan di tingkat fakultas dan program studi.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan seluruh paparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara kompetensi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan kebutuhan pasar kerja merupakan masalah mendesak yang berakar pada tiga isu utama: ketiadaan mekanisme evaluasi kurikulum berbasis data, kurangnya kolaborasi dengan industri, dan proses birokrasi yang lambat. Masalah ini menciptakan siklus negatif yang merugikan lulusan, institusi, dan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang kuat dan strategis. Analisis alternatif kebijakan menunjukkan bahwa solusi paling efektif bukanlah sekadar kegiatan parsial, melainkan regulasi yang mewajibkan penerapan Pemberlakuan Kemitraan Strategis dan pembentukan unit khusus yang memiliki otoritas untuk melakukan analisis data.

Pada akhirnya, rekomendasi kebijakan terbaik adalah Pemberlakuan Kemitraan Strategis. Kebijakan ini mengatur kerangka kerja kolaborasi dan mekanisme kemitraan strategis. Kebijakan ini akan secara fundamental mempercepat adaptasi kurikulum terhadap dinamika pasar. Dengan demikian, PTKI dapat secara proaktif memastikan bahwa setiap lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja, sehingga mengembalikan peran PTKI sebagai lembaga yang relevan dan berkontribusi signifikan pada pembangunan bangsa.

## Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih, direkomendasikan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Perdirjen Pendis) tentang Pemberlakuan Kemitraan Strategis. Kebijakan ini mengatur kerangka kerja kolaborasi dan mekanisme kemitraan strategis. Regulasi ini akan menetapkan kerangka kerja formal yang mengikat, pelaksanaan program dan mahasiswa. Dengan adanya peraturan ini, setiap PTKI akan memiliki panduan yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kurikulumnya selalu relevan dengan kebutuhan riil pasar kerja

## REFERENSI

- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Bryson, J. M. (2004). *What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques*. SAGE Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/10.2307/2095101>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.2307/258191>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Laporan analisis tata kelola perguruan tinggi negeri di Indonesia: Studi kasus kebijakan kurikulum*. Jakarta: Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). *Panduan pelaksanaan tracer study perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Majone, G. (1989). *Evidence, argument, and persuasion in the policy process*. Yale University Press.
- McGrath, S., & King, K. (2018). *Skills for a changing world: New skills for a new economy*. UNESCO-UNEVOC.
- Mulyono, B., & Handayani, T. (2021). Peran kemitraan perguruan tinggi-industri dalam meningkatkan daya saing lulusan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 15(1), 45–58. <https://doi.org/10.5678/jmsdm.v15i1.9101>
- OECD. (2019). *The future of education and skills: Education 2030*. OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47.

*A Path to Job-Ready Graduates: The Urgency of Curriculum Regulation to Overcome the Competency Gap at State Islamic University (UIN) Jurai Siwo Lampung; [365-388]; Supendi*

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952.

Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022.

Purnomo, J., & Santoso, A. (2021). Analisis efisiensi proses administrasi perguruan tinggi: Hasil survei terhadap staf dan dosen di universitas X. *Jurnal Kebijakan Administrasi Publik*, 12(1), 30–45.

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Santoso, A., & Purnomo, J. (2020). Analisis kebutuhan dosen yang relevan dengan perkembangan industri 4.0 di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(3), 220–235. <https://doi.org/10.1234/jpv.v10i3.1122>

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

UNESCO. (2017). *Rethinking education: Towards a global common good?*. UNESCO Publishing.

Wahyudi, S., & Susanto, R. (2020). Analisis hambatan birokrasi dalam reformasi kurikulum perguruan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 115-128. <https://doi.org/10.1234/jkp.v11i2.5678>

Wahyudi, S., & Susanto, R. (2020). Kesenjangan kompetensi lulusan perguruan tinggi dan tuntutan dunia kerja: Studi kasus di sektor industri digital. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 115–128. <https://doi.org/10.1234/jkp.v11i2.5678>

Wahyudi, S., & Susanto, R. (2020). Persepsi dosen terhadap reformasi birokrasi: Sebuah studi survei tentang budaya organisasi di lingkungan perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 88–102.

Wahyudi, S., & Susanto, R. (2022). Reformasi sistem insentif dosen dalam mendorong kolaborasi dengan industri: Studi kasus perguruan tinggi X. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 88–102.

World Bank. (2018). *Investing in human capital: A road map for a digital future*. World Bank Publications.

World Bank. (2018). *Preparing students for the future of work*. World Bank Publications.

World Bank. (2018). *Preparing students for the future of work: How to strengthen university-industry collaboration*. World Bank Publications.